

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DALAM PENANGANAN KASUS MAFIA TANAH (Studi di Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah Provinsi Lampung)

Oleh
FATHIYA FIRDIANSYAH PUTRI

Mafia tanah merupakan sengketa pertanahan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum dengan melakukan perbuatan sengaja untuk menimbulkan sengketa pertanahan, saat ini mafia tanah masih sering terjadi di Indonesia. Dalam kasus mafia tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat yang membuat akta tanah memiliki peran yang sangat besar karena akta yang diterbitkan oleh PPAT akan menjadi bukti bagi kasus mafia tanah. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT mempunyai peran dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PPAT agar dalam menjalankan tugasnya PPAT tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi PPAT. Membahas mengenai bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam menangani kasus mafia tanah serta bagaimana akibat hukum bagi PPAT yang membuat akta palsu.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menyatakan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas Provinsi Lampung mempunyai peran untuk membina serta mengawasi PPAT dengan melaksanakan sosialisasi secara berkala serta melakukan pengawasan untuk memastikan PPAT menjalankan tugas sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada serta fungsi Majelis untuk membina dan mengawasi PPAT sebagai majelis yang harus melakukan pengawasan serta melakukan pemeriksaan terhadap PPAT yang diduga melanggar peraturan dan diduga terlibat dalam kejahatan pertanahan khususnya kasus mafia tanah. PPAT yang terlibat dalam kasus mafia tanah akan mendapatkan sanksi hukum, pada kasus mafia tanah Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan sanksi administratif serta sanksi pidana.

Kata Kunci : *Mafia Tanah, PPAT, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.*

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE PPAT
GUIDANCE AND SUPERVISORY ASSEMBLY IN HANDLING LAND
MAFIA CASES****By****FATHIYA FIRDIANSYAH PUTRI**

Land mafia is a land dispute carried out by individuals, groups or legal entities by carrying out deliberate actions to cause land disputes. Currently, land mafias still often occur in Indonesia. In the land mafia case, the Land Deed Making Official (PPAT) as the official who makes the land deed has a very big role because the deed issued by PPAT will be evidence in the land mafia case. The PPAT Advisory and Supervisory Council has the role and function of providing guidance and supervision for PPAT so that in carrying out its duties PPAT does not violate statutory regulations and the PPAT Professional Code of Ethics. Discusses how to implement the roles and functions of the PPAT Advisory and Supervisory Council in handling land mafia cases and what the legal consequences are for PPATs who make fake deeds.

This type of research is normative-empirical law with a descriptive research type. Data collection was carried out by interviews, literature studies and document studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected will be analyzed qualitatively.

The results of this research and discussion state that the Lampung Province Supervisory and Supervisory Council has a role in developing and supervising PPAT by carrying out regular socialization and carrying out supervision to ensure that PPAT carries out its duties in accordance with existing policy regulations and the function of the Assembly is to develop and supervise PPAT as an appropriate assembly. must supervise and carry out examinations of PPATs who are suspected of violating regulations and are suspected of being involved in land crimes, especially land mafia cases. PPAT involved in land mafia cases will receive legal sanctions, in the South Lampung Regency land mafia case they will receive administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords : Land Mafia, PPAT, PPAT Advisory and Supervisory Council.